



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf e, dan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih yang merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 (ayat 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 04 April 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Penyelenggaraan Pemilu berpedoman kepada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
5. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
6. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPK, PPS dan KPPS.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS.
9. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
10. Warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
11. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah /pernah kawin.
12. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP, adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk melakukan pemutakhiran data pemilih.
14. Data kependudukan adalah data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) yang disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan daftar pemilih.
15. Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS.
16. Tata cara penyusunan daftar pemilih adalah pedoman bagi KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/PPDP sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan kegiatan yang meliputi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir dan daftar pemilih tetap serta daftar pemilih tambahan dan rekapitulasi daftar pemilih tetap.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :
 - a. mandiri ;
 - b. jujur ;
 - c. adil ;
 - d. kepastian hukum ;
 - e. tertib penyelenggaraan Pemilu ;
 - f. kepentingan umum ;
 - g. keterbukaan ;
 - h. proporsionalitas ;

- i. akuntabilitas ;
 - j. efisiensi ; dan
 - k. efektivitas.
- (2) Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis dan tetap, sedangkan PPK dan PPS bersifat ad hoc.

BAB II

HAK MEMILIH

Pasal 3

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak untuk memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Pasal 4

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 5

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap Kelurahan/Desa atau sebutan lain.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 6

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dan/atau menyiapkan data kependudukan.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 7

Penyerahan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan dilampiri data kependudukan dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy).

Pasal 8

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan data pemilih mengadakan koordinasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum penyerahan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data kependudukan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. Selain itu juga memuat status perkawinan dan keterangan berupa antara lain jenis cacat yang disandang oleh pemilih.
- (3) Dalam penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS.

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Bimbingan teknis dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang dan dilaksanakan sebelum pemutakhiran data pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pemutakhiran Data Pemilih

Pasal 11

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemutakhiran data pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah data kependudukan diterima.
- (3) Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS dan PPK.
- (4) Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 12

Waktu pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diatur sebagai berikut :

- a. Kegiatan di Kabupaten/ Kota dan Kecamatan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK berlangsung selama 60 (enam puluh) hari, antara lain :
 - 1) Pengolahan/pemindahan data kependudukan menjadi data pemilih yang berbasis RT/RW termasuk pemilahan untuk setiap TPS ;
 - 2) Pengadaan formulir-formulir untuk pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - 3) Bimbingan teknis PPK, PPS dan operator sistem informasi.
 - 4) Pengiriman data pemilih termasuk soft copy dan formulir-formulir kepada PPK untuk disampaikan kepada PPS.
- b. Kegiatan di Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya oleh PPS dan PPDP berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, antara lain :
 - 1) Pembagian tugas kepada masing-masing PPDP untuk setiap TPS di wilayah kerja PPS ;
 - 2) Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dengan pencocokan dan penelitian (coklit) PPDP sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1) ;
 - 3) PPDP dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) sebagaimana dimaksud pada angka (2) masing-masing mengelompokkan paling banyak 500 (lima ratus) orang yang diperkirakan untuk setiap TPS.

Pasal 13

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun data pemilih berdasarkan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) KPU Kabupaten/Kota memindahkan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam data pemilih dengan menggunakan formulir (Model A).
- (3) Pemindahan data kependudukan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke dalam data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem komputerisasi.
- (4) KPU Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPK, PPS dan tenaga operator.
- (5) KPU Kabupaten/Kota menandatangani data pemilih (Model A) sebelum disampaikan kepada PPS.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pemilih kepada semua PPS di wilayah kerjanya melalui PPK.
- (7) Data pemilih yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan :
 - a). 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPK;
 - b). 2 (dua) rangkap untuk PPS, masing-masing 1 (satu) rangkap sebagai arsip di PPS dan 1 (satu) rangkap untuk pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh PPDP.
- (8) Data pemilih yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan blanko formulir Daftar Pemilih Sementara (DPS) Model A1, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Model A2.1 dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DSHP Akhir) Model A.2.2 yang jumlahnya ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) PPK melakukan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPS dan PPDP di wilayah kerja PPK .
- (2) PPK menyampaikan Data Pemilih (Model A) beserta formulir DPS (Model A1), DPSHP (Model A2.1) dan DPSHP Akhir (Model A2.2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) kepada PPS.

Pasal 15

- (1) PPS setelah menerima data pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. menyusun data pemilih yang berbasis RT/RW atau sebutan lain yang dibagi ke dalam setiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 500 (lima ratus) orang untuk setiap TPS;
 - b. melaksanakan sosialisasi pemutakhiran data pemilih melalui PPDP kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain;
- (2) PPS dalam menyusun data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPDP.

Pasal 16

- (1) Dalam pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PPS dibantu oleh PPDP yang terdiri atas perangkat Kelurahan/Desa, Rukun Warga, Rukun Tetangga atau sebutan lainnya, dan warga masyarakat.
- (2) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
- (3) PPS melaksanakan bimbingan teknis pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih kepada PPDP.
- (4) PPS mengeluarkan surat tugas bagi PPDP untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Pasal 17

- (1) Dalam kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, PPS dan PPDP mengadakan perbaikan terhadap data pemilih, antara lain meliputi :
 - a. meneliti usia pemilih apakah telah memenuhi syarat usia pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 atau mencoret/mengurangi yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih ;
 - b. mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi tidak terdaftar dalam data kependudukan/data pemilih;
 - c. mencoret pemilih yang telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke daerah lain;
 - e. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas. Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI;

- f. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI; atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- g. perbaikan penulisan identitas pemilih.

Pasal 18

- (1) PPDP dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih berkoordinasi dengan pengurus RT/RW atau sebutan lainnya setelah mendapat pengarahannya dari PPS.
- (2) PPDP melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dengan menggunakan formulir data pemilih (Model A).
- (3) Apabila dalam pencocokan dan penelitian (coklit) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat pemilih yang belum terdaftar dalam data pemilih belum mempunyai NIK, agar dicatat untuk dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Perubahan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ditulis atau diketik dalam formulir data pemilih (Model A) dengan memberi paraf PPDP pada setiap halamannya.
- (2) Pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilaksanakan oleh PPDP berlangsung sejak data pemilih diterima dari PPS.
- (3) PPS/PPDP menandatangani data pemilih (Model A) yang sudah diteliti dan dicocokkan.
- (4) PPDP menyerahkan hasil pemutakhiran data pemilih (Model A) berdasarkan pencocokan dan penelitian (coklit) kepada PPS.
- (5) PPS menghimpun hasil pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari seluruh PPDP di wilayah kerja PPS.
- (6) Data Pemilih yang ada di PPS disesuaikan dengan hasil pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 20

Kegiatan pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS termasuk PPDP, harus memperhatikan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB IV

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Bagian Kesatu

Daftar Pemilih Sementara

Pasal 21

- (1) Hasil pemutakhiran data pemilih (Model A) sebanyak 2 (dua) rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) digunakan oleh PPS untuk menyusun DPS menggunakan formulir (Model A1), dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf a.
- (2) DPS disusun oleh PPS dibantu PPDP berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih sebagaimana di maksud dalam Pasal 18.
- (3) DPS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tanda tangani oleh Ketua PPS.

Pasal 22

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa salinannya harus diberikan oleh PPS kepada Peserta Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun perseorangan (Calon Anggota DPD) di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
- (3) PPS menyerahkan salinan DPS sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada peserta Pemilu atau yang mewakili peserta Pemilu setelah mendapat mandat secara tertulis dari peserta Pemilu.
- (4) Salinan DPS yang diberikan kepada Peserta Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun perseorangan (Calon Anggota DPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PPS diberikan tanda terima penyerahan.

Pasal 23

- (1) Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) sudah diterima PPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak hari pertama DPS diumumkan.
- (2) PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.
- (3) PPS menerima masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis maupun lisan yang dibukukan dalam satu catatan yang ditandatangani oleh PPS dan pemberi masukan dengan mencantumkan nama masing-masing secara lengkap dan jelas.

- (4) Masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. tidak terdaftar dalam DPS, tetapi telah memenuhi syarat usia pemilih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 atau mencoret yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - b. telah meninggal dunia;
 - c. pindah domisili ke daerah lain;
 - d. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas. Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/ purnabakti atau sebaliknya, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI;
 - e. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI;
 - f. perbaikan penulisan identitas pemilih
- (5) Apabila tidak ada masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membubuhkan tulisan NIHIL pada formulir DPSHP (Model A2.1).

Bagian Kedua

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Pasal 24

- (1) PPS memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) DPS sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh PPS disusun ke dalam DPSHP (Model A2.1).
- (3) DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua PPS.
- (4) DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh PPS selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.
- (5) Apabila DPSHP yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu, PPS wajib melakukan perbaikan terhadap DPSHP sejak hari pertama DPSHP diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila tidak ada masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPS membubuhkan tulisan NIHIL pada formulir DPSHP (Model A2.1).

Pasal 25

- (1) PPS melakukan perbaikan terhadap DPSHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman.
- (2) PPS menerima masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis maupun lisan yang dibukukan dalam satu catatan yang ditandatangani oleh PPS dan pemberi masukan dengan mencantumkan nama masing-masing secara lengkap dan jelas.

- (3) Perbaiki DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam DPSHP Akhir (Model A2.2).
- (4) DPSHP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua PPS.
- (5) PPS harus memberikan salinan DPSHP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Peserta Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun perseorangan (Calon Anggota DPD) di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya.
- (6) PPS menyerahkan salinan DPSHP Akhir sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada Peserta Pemilu atau yang mewakili Peserta Pemilu setelah mendapat mandat secara tertulis dari Peserta Pemilu
- (7) Salinan DPSHP Akhir yang diberikan kepada Peserta Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun perseorangan (DPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh PPS diberikan tanda terima penyerahan.

Pasal 26

Penulisan DPS (Model A1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), perubahan DSHP (Model A2.1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan DPSHP Akhir (Model A2.2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dilakukan dengan diketik menggunakan mesin ketik/komputer.

Pasal 27

- (1) PPS mengirim DPS (Model A1), DPSHP (Model A2.1) dan DPSHP Akhir (Model A2.2) sebanyak 1 (satu) rangkap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK digunakan sebagai bahan penyusun DPT.
- (2) PPS menyimpan DPS (Model A1), DPSHP (model A2.1) dan DPSHP Akhir (Model A2.2) sebagai dokumen/arsip.

BAB V

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Bagian Kesatu

Daftar Pemilih Tetap

Pasal 28

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DPT dengan menggunakan formulir (Model A3) berdasarkan DPS, DPSHP dan DPSHP Akhir yang disampaikan oleh PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam satuan TPS.
- (3) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU dan ditandatangani oleh Ketua KPU.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya DPS, DPSHP dan DPSHP Akhir dari PPS.

Pasal 29

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS.
- (2) Penyampaian DPT kepada KPU dan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk copy peranti lunak (softcopy), cakram padat (compact disc), atau foto copy.
- (3) DPT yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) rangkap untuk keperluan pengumuman di PPS dan yang akan digunakan oleh KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (4) KPU Kabupaten/Kota harus memberikan salinan DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, dalam bentuk copy peranti lunak (softcopy), cakram padat (compact disc), atau foto copy. Salinan DPT atau foto copy DPT dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten/Kota.
- (5) KPU Kabupaten/Kota dalam menyerahkan salinan DPT sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendapat mandat secara tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu dan diberikan tanda terima penyerahan.

Bagian Kedua

Pengumuman Daftar Pemilih Tetap

Pasal 30

- (1) DPT yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), oleh PPS diumumkan sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) PPS dalam mengumumkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara menempelkan salinan DPT di papan pengumuman dan/atau di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS untuk digunakan dalam melaksanakan pemungutan suara.

Bagian Ketiga

Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 31

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilengkapi dengan DPTB sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) DPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS, tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga diluar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Untuk dapat dimasukkan dalam DPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan DPTB (Model A5) yang akan digunakan hak memilih di TPS lain.

Pasal 33

- (1) PPS berdasarkan laporan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meneliti apakah pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT.
- (2) Apabila pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, PPS mencatat atau memberikan catatan dalam kolom keterangan pada DPTB (Model A5) dan memberikan Surat Pemberitahuan DPTB (Model A5) dengan ketentuan lembar kesatu untuk pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS.

Pasal 34

- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menunjukkan Surat Pemberitahuan DPTB kepada PPS/KPPS yang wilayahnya membawahi TPS tujuan dimana pemilih yang bersangkutan akan menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain.
- (2) PPS/KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pemilih yang bersangkutan dalam DPTB (Model A4) .
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung kepada KKPS pada hari/tanggal pemungutan suara, dengan menunjukan Surat Pemberitahuan DPTB dan KPPS mencatat nama pemilih dalam DPTB.
- (4) Dalam hal pada satu TPS terdapat pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS mencatat dalam DPTB (Model A4) dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS/PPK.

Bagian Keempat

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Pasal 35

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT di Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT di Provinsi.
- (3) KPU melakukan rekapitulasi DPT secara Nasional.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, perbaikan dan pengumuman DPSHP, penetapan dan pengumuman DPT, DPTB dan rekapitulasi DPT yang dilaksanakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, maka Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan temuan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
- (2) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 39

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota setelah menerima data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, segera melakukan kegiatan survei yang hasilnya disampaikan kepada publik untuk mengetahui akurasi kelayakan dan kualitas data pemilih,
- (2) Untuk keperluan mengetahui akurasi kelayakan dan kualitas data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan jaringan teknologi yang sudah terbangun.

Pasal 40

Rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 digunakan sebagai bahan penyusunan rencana pengadaan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu serta pendistribusiannya.

Pasal 41

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi lain yang dianggap perlu.

Pasal 42

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat membuat petunjuk teknis pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih kepada PPK, PPS dan PPDP dengan berpedoman pada Peraturan ini.
- (2) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPDP dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, berpedoman kepada Keputusan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat menyerahkan data kependudukan (DP4) sesuai jadwal yang telah ditetapkan 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan data Pemilu terakhir sebagai dasar pemutakhiran data pemilih.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Penggunaan formulir untuk kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Contoh formulir Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2008

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

**PENGUNAAN FORMULIR UNTUK KEGIATAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

- 1 Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan formulir (Model A) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS termasuk PPDP untuk memindahkan data kependudukan menjadi data pemilih.
- 2 Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilaksanakan oleh PPS dengan menggunakan formulir (Model A1) untuk menyusun DPS dengan berbasis RT dan RW atau sebutan lainnya dalam setiap TPS.
- 3 Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) awal, dilaksanakan oleh PPS dengan menggunakan formulir (Model A2.1).
- 4 Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) dilaksanakan oleh PPS dengan menggunakan formulir (Model A2.2).
- 5 Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir (Model A3).
- 6 Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dilaksanakan oleh PPS/KPPS dengan menggunakan formulir (Model A4).
- 7 Surat Pemberitahuan DPTB (SPDPTB) diberikan oleh PPS asal kepada pemilih dengan menggunakan formulir (Model A5), untuk memberikan suara di TPS lain pada hari/tanggal pemungutan suara di TPS.
- 8 Rekapitulasi DPT di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir (Model A6).
- 9 Rekapitulasi DPT di Provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi dengan menggunakan formulir (Model A7).
- 10 Rekapitulasi DPT secara nasional dilaksanakan oleh KPU dengan menggunakan formulir (Model A8).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2008

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya



CONTOH

Lampiran II Peraturan KPU
Nomor : 10 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

Model A

DATA PEMILIH

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahun :

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

| NO | NIK | NAMA LENGKAP | TEMPAT/TGL LAHIR | UMUR | STATUS PERKAWINAN | JENIS KELAMIN | | ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW) | KETERANGAN * |
|----|-----|--------------|------------------|------|-------------------|---------------|---|--|--------------|
| | | | | | | L | P | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 8 | 9 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |

* Pada kolom keterangan ditulis jenis cacat yang disandang Halaman.....

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :
 TPS :

| NO | NIK/NO PEMILIH | NAMA LENGKAP | TEMPAT/TGL LAHIR | UMUR | STATUS PERKAWINAN | JENIS KELAMIN | | ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW) | KETERANGAN * |
|----|----------------|--------------|------------------|------|-------------------|---------------|---|--|--------------|
| | | | | | | L | P | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |

Halaman.....
 telah diadakan pencocokan dan penelitian
 Panitia Pemungutan Suara /
 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Disusun di.....
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 Ketua,

(.....)

(.....)

CONTOH

Lampiran II Peraturan KPU
Nomor : 10 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

Model A1

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Tahun

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

| NO | NIK | NAMA LENGKAP | TEMPAT/TGL LAHIR | UMUR | STATUS PERKAWINAN | JENIS KELAMIN | | ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW) | KETERANGAN * |
|----|-----|--------------|------------------|------|-------------------|---------------|---|--|--------------|
| | | | | | | L | P | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |

* Pada kolom keterangan ditulis jenis cacat yang disandang Halaman.....

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
 DESAKELURAHAN :
 TPS :

| NO | NIK/NO PEMILIH | NAMA LENGKAP | TEMPAT/TGL LAHIR | UMUR | STATUS PERAWINAN | JENIS KELAMIN | | ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW) | KETERANGAN * |
|----|----------------|--------------|------------------|------|------------------|---------------|---|--|--------------|
| | | | | | | L | P | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |

Halaman.....

Disahkan di.....
 Panitia Pemungutan Suara
 Ketua,

(.....)

CONTOH

Lampiran II Peraturan KPU
Nomor : 10 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

Model A2.1

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Tahun

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

| NO | NIK | NAMA LENGKAP | TEMPAT/TGL LAHIR | UMUR | STATUS PERKAWINAN | JENIS KELAMIN | | ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW) | KETERANGAN * |
|----|-----|--------------|------------------|------|-------------------|---------------|---|--|--------------|
| | | | | | | L | P | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |

* Pada kolom keterangan ditulis jenis cacat yang disandang Halaman.....

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :
 TPS :

| NO | NIK | NAMA LENGKAP | TEMPAT/TGL LAHIR | UMUR | STATUS PERKAWINAN | JENIS KELAMIN | | ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW) | KETERANGAN * |
|----|-----|--------------|------------------|------|-------------------|---------------|---|--|--------------|
| | | | | | | L | P | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |

Halaman.....

Disahkan di.....
 Panitia Pemungutan Suara
 Ketua,

(.....)

CONTOH

Lampiran II Peraturan KPU
Nomor : 10 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

Model A2.2

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN AKHIR
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahun :

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KEKURAHAN :
TPS :

| NO | NIK | NAMA LENGKAP | TEMPAT/TGL LAHIR | UMUR | STATUS PERKAWINAN | JENIS KEJAMIN | | ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW) | KETERANGAN * |
|----|-----|--------------|------------------|------|-------------------|---------------|---|--|--------------|
| | | | | | | L | P | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |

* Pada kolom keterangan ditulis jenis cacat yang disandang Halaman.....

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :
 TPS :

| NO | NIK | NAMA LENGKAP | TEMPAT/TGL LAHIR | UMUR | STATUS PERKAWINAN | JENIS KELAMIN | | ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW) | KETERANGAN * |
|----|-----|--------------|------------------|------|-------------------|---------------|---|--|--------------|
| | | | | | | L | P | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |

Halaman.....

Disahkan di.....
 Panitia Pemungutan Suara
 Ketua,

(.....)

CONTOH

Lampiran II Peraturan KPU
Nomor : 10 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

Model A3

DAFTAR PEMILIH TETAP
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahun :

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

| NO | NIK | NAMA LENGKAP | TEMPAT/TGL LAHIR | UMUR | STATUS PERKAWINAN | JENIS KELOMPOK | | ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW) | KETERANGAN * |
|----|-----|--------------|------------------|------|-------------------|----------------|---|--|--------------|
| | | | | | | L | P | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |

* Pada kolom keterangan ditulis jenis cacat yang disandang

PROVINSI
 KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN
 DESA/KELURAHAN
 TPS

| NO | NIK | NAMA LENGKAP | TEMPAT/TGL LAHIR | UMUR | STATUS PERKAWINAN | JENIS KELAMIN | | ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW) | KETERANGAN * |
|----|-----|--------------|------------------|------|-------------------|---------------|---|--|--------------|
| | | | | | | L | P | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |

Halaman

Ditetapkan di
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

 Ketua,

(.....)

CONTOH

Lampiran II Peraturan KPU
Nomor : 10 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

Model A4

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahun

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KEKELURAHAN :
TPS :

| NO | NIK | NAMA LENGKAP | TEMPAT/TGL LAHIR | UMUR | STATUS PERKAWINAN | JENIS KELAMIN | | ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW) | KETERANGAN * |
|----|-----|--------------|------------------|------|-------------------|---------------|---|--|--------------|
| | | | | | | L | P | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |

* Pada kolom keterangan ditulis jenis cacat yang disandang

PROVINSI
 KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN
 DESAKELURAHAN
 TPS

| NO | NIK | NAMA LENGKAP | TEMPAT/TGL LAHIR | UMUR | STATUS PERKAWINAN | JENIS KELAMIN | | ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW) | KETERANGAN * |
|----|-----|--------------|------------------|------|-------------------|---------------|---|--|--------------|
| | | | | | | L | P | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 8 | 9 |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |

Halaman.....

Ditetapkan di
 A.n Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 Panitia Pemungutan Suara
 Ketua,

(.....)

CONTOH

Lampiran II Peraturan KPU
Nomor : 10 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

Model A5

**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN)
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD**

Tahun :

NIK :
Nama :
Alamat :
.....
.....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS (Asal) : 3 Kabupaten/Kota :
2 Desa/Kelurahan : 4 Provinsi :
.....
.....

Digunakan oleh Pemilih* untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di* :

1 TPS/TPSLN (Tujuan) : 3 Kabupaten/Kota/PPLN :
2 Desa/Kelurahan : 4 Provinsi/Negara :
.....
.....

* Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
A.n Ketua KPU Kabupaten/Kota
.....
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,
.....

(.....)

CONTOH

Lampiran II Peraturan KPU
Nomor : 10 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

Model A5

**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN)
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD**

Tahun :

NIK :
Nama :
Alamat :
.....
.....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS (Asal) : 3 Kabupaten/Kota :
2 Desa/Kelurahan : 4 Provinsi :
.....
.....

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS/TPSLN (Tujuan) : 3 Kabupaten/Kota/PPLN :
2 Desa/Kelurahan : 4 Provinsi/Negara :
.....
.....

* Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
A.n Ketua KPU Kabupaten/Kota
.....
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,
.....

(.....)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahun :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH PEMILIH | | | JUMLAH TPS | KETERANGAN |
|---------------|----------------|----------------|---|-------|------------|------------|
| | | L | P | L + P | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | |

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH PEMILIH | | | JUMLAH TPS | KETERANGAN |
|---------------|----------------|----------------|---|-----|------------|------------|
| | | L | P | L+P | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 51 | | | | | | |
| 52 | | | | | | |
| 53 | | | | | | |
| 54 | | | | | | |
| 55 | | | | | | |
| 56 | | | | | | |
| 57 | | | | | | |
| 58 | | | | | | |
| 59 | | | | | | |
| 60 | | | | | | |
| 61 | | | | | | |
| 62 | | | | | | |
| 63 | | | | | | |
| 64 | | | | | | |
| 65 | | | | | | |
| 66 | | | | | | |
| 67 | | | | | | |
| 68 | | | | | | |
| 69 | | | | | | |
| 70 | | | | | | |
| 71 | | | | | | |
| 72 | | | | | | |
| 73 | | | | | | |
| 74 | | | | | | |
| 75 | | | | | | |
| 76 | | | | | | |
| 77 | | | | | | |
| 78 | | | | | | |
| 79 | | | | | | |
| 80 | | | | | | |
| 81 | | | | | | |
| 82 | | | | | | |
| 83 | | | | | | |
| 84 | | | | | | |
| 85 | | | | | | |
| 86 | | | | | | |
| 87 | | | | | | |
| 88 | | | | | | |
| 89 | | | | | | |
| 90 | | | | | | |
| 91 | | | | | | |
| 92 | | | | | | |
| 93 | | | | | | |
| 94 | | | | | | |
| 95 | | | | | | |
| 96 | | | | | | |
| 97 | | | | | | |
| 98 | | | | | | |
| 99 | | | | | | |
| 100 | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | |

Halaman.....

Ditetapkan di.....
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

 Ketua,

(.....)

CONTOH

Lampiran II Peraturan KPU
Nomor : 10 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

Model A7

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahun :

PROVINSI :

| NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH PEMILIH | | | JUMLAH TPS | KETERANGAN |
|---------------|---------------------|----------------|---|-------|------------|------------|
| | | L | P | L + P | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | |

PROVINSI :

| NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH PEMILIH | | | JUMLAH TPS | KETERANGAN |
|--------|---------------------|----------------|---|-------|------------|------------|
| | | L | P | L + P | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 51 | | | | | | |
| 52 | | | | | | |
| 53 | | | | | | |
| 54 | | | | | | |
| 55 | | | | | | |
| 56 | | | | | | |
| 57 | | | | | | |
| 58 | | | | | | |
| 59 | | | | | | |
| 60 | | | | | | |
| 61 | | | | | | |
| 62 | | | | | | |
| 63 | | | | | | |
| 64 | | | | | | |
| 65 | | | | | | |
| 66 | | | | | | |
| 67 | | | | | | |
| 68 | | | | | | |
| 69 | | | | | | |
| 70 | | | | | | |
| 71 | | | | | | |
| 72 | | | | | | |
| 73 | | | | | | |
| 74 | | | | | | |
| 75 | | | | | | |
| 76 | | | | | | |
| 77 | | | | | | |
| 78 | | | | | | |
| 79 | | | | | | |
| 80 | | | | | | |
| 81 | | | | | | |
| 82 | | | | | | |
| 83 | | | | | | |
| 84 | | | | | | |
| 85 | | | | | | |
| 86 | | | | | | |
| 87 | | | | | | |
| 88 | | | | | | |
| 89 | | | | | | |
| 90 | | | | | | |
| 91 | | | | | | |
| 92 | | | | | | |
| 93 | | | | | | |
| 94 | | | | | | |
| 95 | | | | | | |
| 96 | | | | | | |
| 97 | | | | | | |
| 98 | | | | | | |
| 99 | | | | | | |
| 100 | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | |

Halaman.....

Ditetapkan di.....
Komisi Pemilihan Umum Provinsi.....
Ketua,

(.....)

CONTOH

Lampiran II Peraturan KPU
Nomor : 10 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

Model A8

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahun :

SELURUH INDONESIA

| NO | NAMA PROVINSI | JUMLAH PEMILIH | | | KETERANGAN |
|---------------|---------------|----------------|---|-------|------------|
| | | L | P | L + P | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | |
| 48 | | | | | |
| 49 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| JUMLAH | | | | | |

SELURUH INDONESIA

| NO | NAMA PROVINSI | JUMLAH PEMILIH | | | KETERANGAN |
|---------------|---------------|----------------|---|-------|------------|
| | | L | P | L + P | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | | | | | |
| 52 | | | | | |
| 53 | | | | | |
| 54 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 56 | | | | | |
| 57 | | | | | |
| 58 | | | | | |
| 59 | | | | | |
| 60 | | | | | |
| 61 | | | | | |
| 62 | | | | | |
| 63 | | | | | |
| 64 | | | | | |
| 65 | | | | | |
| 66 | | | | | |
| 67 | | | | | |
| 68 | | | | | |
| 69 | | | | | |
| 70 | | | | | |
| 71 | | | | | |
| 72 | | | | | |
| 73 | | | | | |
| 74 | | | | | |
| 75 | | | | | |
| 76 | | | | | |
| 77 | | | | | |
| 78 | | | | | |
| 79 | | | | | |
| 80 | | | | | |
| 81 | | | | | |
| 82 | | | | | |
| 83 | | | | | |
| 84 | | | | | |
| 85 | | | | | |
| 86 | | | | | |
| 87 | | | | | |
| 88 | | | | | |
| 89 | | | | | |
| 90 | | | | | |
| 91 | | | | | |
| 92 | | | | | |
| 93 | | | | | |
| 94 | | | | | |
| 95 | | | | | |
| 96 | | | | | |
| 97 | | | | | |
| 98 | | | | | |
| 99 | | | | | |
| 100 | | | | | |
| JUMLAH | | | | | |

Halaman.....

Ditetapkan di.....
 Komisi Pemilihan Umum
 Ketua,

(.....)